

PERSIAPAN PEREMAJAAN KEBUN KELAPA SAWIT OLEH KUD SUKA MAJU DAN KUD BUKIT JAYA DI KABUPATEN DHARMASRAYA PROPINSI SUMATERA BARAT

Melinda Noer ^{*}), Ira Wahyuni Syarfi, dan Rafnel Azhari
Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Andalas

^{*}) Email: melindanoer@yahoo.com

ABSTRAK

Secara nasional program meremajakan kelapa sawit menjadi perhatian Pemerintah sehingga didukung dengan kebijakan bantuan dana hibah *replanting* yang menggunakan dana dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), termasuk Provinsi Sumatera Barat. Di Kabupaten Dharmasraya, KUD Suka Maju mendapatkan dana hibah untuk realisasi *replanting* tahun 2019, sementara KUD Bukit Jaya untuk realisasi tahun 2020. Tulisan ini mendeskripsikan hasil kegiatan pengabdian kepada kedua KUD tersebut dalam persiapan *replanting* kelapa sawit menggunakan dana BPDPKS. Tujuan kegiatan adalah mendorong dan menghidupkan kembali semangat kerja sama KUD dan membantu mempercepat terjadinya koordinasi efektif antar *stakeholders* dalam program *replanting* di kabupaten Dharmasraya. Dalam konteks pembangunan daerah yang lebih luas, khususnya pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan, maka program *replanting* kelapa sawit ini perlu melibatkan *stakeholders* sejak tahap awal perencanaan sampai implementasi dan evaluasi. Koordinasi antar dinas pemerintah terkait membutuhkan peran serta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) sebagai koordinator perencanaan daerah, serta perlu menginternalisasikan rencana program *replanting* dengan semua aspeknya kedalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Kata Kunci: *peremajaan, kebun, kelapa sawit, Sumatera Barat*

Oil Palm Replantation and Preparation KUD Suka Maju and KUD Bukit Jaya in Dharmasraya District, West Sumatra Province

ABSTRACT

Replanting of oil palm plantations in West Sumatra was encouraged by unproductive age of the plant. Nationally, The oil palm replanting program has become the main attention of the government so that it is supported by a replanting grant policy that uses funds from the Palm Oil Plantation Fund Management Agency (BPDPKS). In Dharmasraya District, KUD Suka Maju received a grant for the realization of replanting in the year 2019, while KUD Bukit Jaya received approval for the realization in 2020. This paper describes the results of the community service activities for both KUD in preparing the replantation of oil palm using BPDPKS grant. The activity objectives are to encourage and revitalize the KUD in order to develop coordination effectively among stakeholders in oil palm replanting program in Dharmasraya district. In the regional development context, specifically in the development of sustainable oil palm plantation, the replanting program should involve stakeholders from the beginning of planning until its implementation and evaluation. Coordination between relevant government agencies requires the roles of the Regional Development Planning and Research Agency (Bappelitbangda) as the regional plan coordinator, and replanting program needs to be internalized into Strategic Plan (Renstra) of Technical Institution (Dinas) and the Regional Medium-Term Development Plan (RPJMD).

Keyword: *rejuvenation, plantation, oil palm, West Sumatra*

PENDAHULUAN

Pada konteks pembangunan daerah, upaya untuk mewujudkan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan harus dilakukan secara terintegrasi sebagai program pembangunan daerah dan terkoordinasikan kepada semua *stakeholders* (pemerintah/ instansi teknis terkait, perusahaan perkebunan kelapa sawit, pedagang / eksportir, dan petani / kelompok tani kelapa sawit). Salah satu upaya tersebut dan saat ini sudah tepat waktunya adalah program peremajaan (*replanting*) terhadap tanaman yang sudah melewati usia optimal untuk produksi karena sudah tua. Replanting juga dapat dilakukan untuk tanaman yang tidak produktif atau rusak.

Peremajaan tanaman kelapa sawit dilakukan untuk tanaman yang sudah tua dan melewati umur tanaman 25 tahun (Pahan, 2008). Program *replanting* membutuhkan upaya lintas sektor dalam hal pengembangan sumber daya manusia dan sarana dan prasarana perkebunan kelapa sawit. Selain itu juga perlu dukungan pendanaan (pembiayaan) *replanting*, mulai dari persiapan lahan di atas kebun yang sudah ada, penyiapan sarana produksi, penanaman, dan juga pemeliharaan. Perlu juga diperhitungkan sumber pendapatan petani (rumah tangga tani) selama tanaman belum menghasilkan dan kelembagaan yang akan mensukseskan program replanting.

Program *replanting* di Indonesia secara nasional didukung dengan kebijakan pemerintah melalui program penyediaan dana hibah peremajaan kelapa sawit dari dana Badan Pengelola Dana Perkebunan Kepala Sawit (BPDPKS) terutama untuk tanaman tua berumur lebih dari 25 tahun. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016, menyebutkan bahwa Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) mempunyai tugas mulai dari merencanakan, menganggarkan, menghimpun, mengelola dan menyalurkan penggunaan dana, penatausahaan dan pertanggungjawaban, serta mengawas dana peremajaan kelapa sawit, pengembangan sumber daya manusia dan bantuan sarana dan prasarana;

Berdasarkan kegiatan pendampingan Tim Pengabdian kepada petani kelapa sawit di Kabupaten Dharmasraya tahun lalu, diperoleh gambaran bahwa kelompok tani melalui KUD sedang melakukan persiapan untuk *replanting* dan mengajukan pembiayaan replanting kepada BPDPKS. KUD Suka Maju dan KUD Bukit Jaya di Kabupaten Dharmasraya adalah dua Koperasi yang mendapatkan dana hibah tersebut. Dana hibah untuk KUD Suka Maju disetujui dan direalisasikan tahun 2019, sementara untuk KD Bukit Jaya mendapatkan persetujuan tahun 2019 dan akan direalisasikan tahun 2020.

Permasalahan program *replanting* di Kabupaten Dharmasraya adalah: (1) kekhawatiran petani dalam persiapan dan implementasi *replanting*, terutama persoalan penyesuaian dan antisipasi kondisi ekonomi karena berkurangnya sumber mata pencaharian selama fase tanaman belum menghasilkan (TBM); (2) lemahnya koordinasi antar *stakeholders* lain dan kelompok tani atau KUD, yaitu koordinasi antar dinas (instansi teknis terkait) dan perusahaan perkebunan kelapa sawit yang selama ini berperan dalam pembangunan perkebunan kelapa sawit rakyat.

Untuk menjawab permasalahan tersebut, maka tujuan kegiatan pengabdian adalah: (1) untuk mendapatkan gambaran persiapan KUD Suka Maju dan KUD Bukit

Jaya dalam menerima dana hibah *replanting* dan realisasi *replanting*; (2) memberikan rekomendasi untuk perbaikan koordinasi program *replanting* kelapa sawit terkait pembangunan daerah depan. Manfaatnya adalah menyumbang kepada perbaikan perencanaan program perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Dharmasraya khususnya, dan perkebunan kelapa sawit provinsi Sumatera Barat secara lebih luas.

Diharapkan KUD yang didampingi dalam memberdayakan koperasi melalui anggotanya akan lebih memahami pentingnya *replanting* dan bersedia mengikuti program *replanting*. Pendampingan ini juga membantu mensukseskan kegiatan peremajaan perkebunan sawit di Kabupaten Dharmasraya, dan dapat menjadi proyek percontohan untuk kegiatan peremajaan kebun sawit rakyat di Provinsi Sumatera Barat. Dengan pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan, diharapkan petani sawit menjadi lebih bergairah untuk mengelola kebun sawit dengan lebih baik.

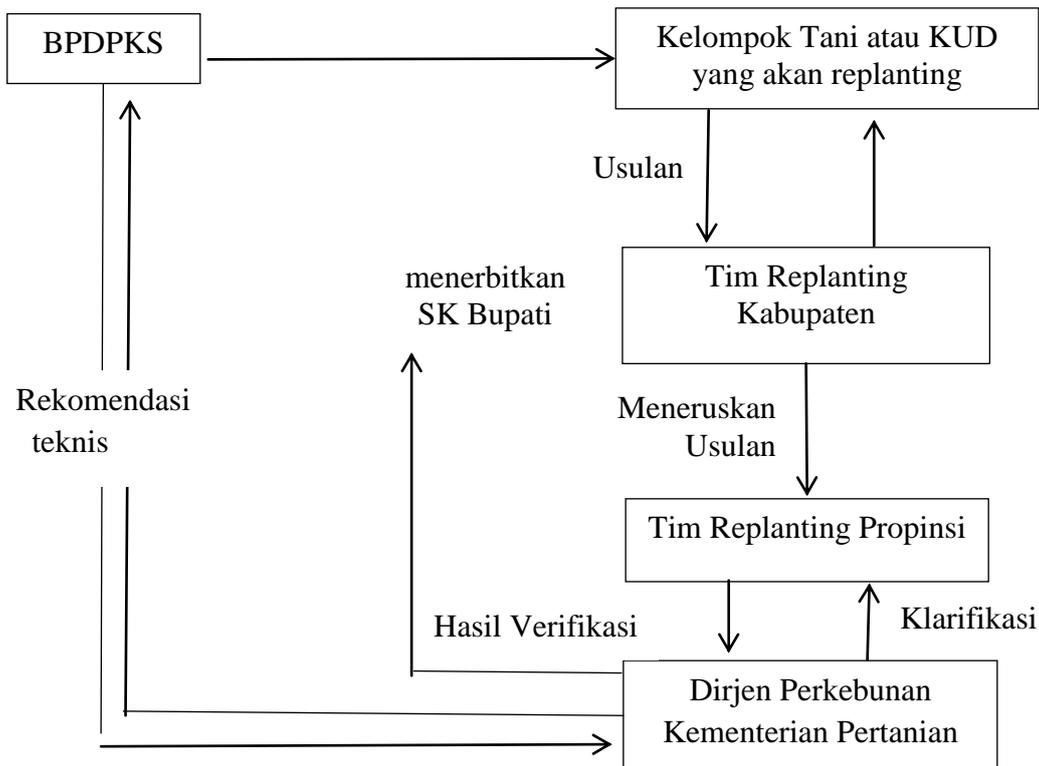
Merujuk kepada pasal 57 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan telah diatur bahwa dalam rangka kegiatan pemberdayaan usaha perkebunan, pengusaha perkebunan perlu melakukan kerja sama dengan konsep kemitraan. Konsep kemitraan yang dianut berasaskan kepada prinsip saling menguntungkan, saling menghargai, saling bertanggung jawab, dan saling memperkuat, serta menjaga ikatan saling membutuhkan dan ketergantungan antar semua pihak terlibat. Pihak tersebut antara lain adalah Petani perkebunan, karyawan, masyarakat sekitar perkebunan, serta pemerintah sebagai fasilitator.

Hal ini sangat relevan dengan konsep pembangunan wilayah, dimana perkebunan rakyat termasuk perkebunan kelapa sawit rakyat adalah salah satu sektor yang berperan sebagai pendorong pembangunan wilayah sehingga perlu dibangun berkesinambungan (Wahyono, 2014). Kemitraan yang dimaksud dalam usaha perkebunan secara umum dalam implementasi nya dapat direalisasikan dalam bentuk pola kerja sama dalam hal perencanaan dan penyediaan sarana produksi, teknis budidaya atau masa produksi, kegiatan pasca panen dan pengolahan, serta bermitra dalam kegiatan pemasaran. Selain itu, mitra juga dapat dibangun dalam bentuk ketetapan hak kepemilikan saham atau jasa pendukung lainnya.

Terkait dengan kemitraan ini, kegiatan peremajaan kebun rakyat yang dimiliki masyarakat tani dapat diwujudkan dalam bentuk tiga pola, yaitu:

- a) Peremajaan kebun dilakukan oleh masyarakat tani, secara mandiri atau swadaya dengan kelembagaan yang dibangun dan dikembangkan oleh petani /pekebun;
- b) Peremajaan kebun dilakukan oleh masyarakat tani melalui kelembagaan (kelompok tani atau koperasi) bersama-sama dengan mitra kerja;
- c) Peremajaan kebun dilakukan oleh perusahaan perkebunan sebagai mitra kerja dari masyarakat tani.

Mitra kerja atau perusahaan perkebunan kelapa sawit dimaksud adalah yang perusahaan memiliki industri pengolahan kelapa sawit yang berada di kawasan / lokasi kebun yang melakukan peremajaan. Setiap pihak terlibat dalam peremajaan harus mempunyai komitmen untuk mematuhi hak dan kewajiban masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Gambar 1 memperlihatkan proses dan hubungan antar pihak di lokasi kebun dan di daerah terkait dalam merealisasikan dana *replanting*.



Gambar 1. Skema Replanting Kelapa Sawit dengan Dana Hibah dari BPDPKS
 Sumber: Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor: 29/Kpts/Kb.120/3/2017

Replanting perkebunan kelapa sawit di kabupaten Dharmasraya telah memasuki tahap persiapan dan Kabupaten ini menjadi pilot proyek program nasional replanting kebun kelapa sawit untuk Provinsi Sumatera Barat, melalui skim hibah dana dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) tahun anggaran 2019. Pemerintah Kabupaten Dharmasraya telah menetapkan Tim Replanting Daerah Kabupaten yang akan berkoordinasi dengan tim replanting daerah Propinsi. Tim ini juga sudah menyiapkan lahan yang akan di replanting seluas 1.700 Ha dari 3.000 Ha luas lahan yang direncanakan akan mengikuti program replanting perkebunan kelapa sawit di Kabupaten (Kabid Perkebunan, Dinas Pertanian Kabupaten Dharmasraya. 2019).

Mengingat kondisi bahwa belum semua kelompok tani maupun KUD di Kabupaten Dharmasraya dapat diikutsertakan ke dalam program replanting nasional tahun 2019 ini, maka perlu dilakukan upaya yang lebih luas untuk membantu memcepat terlaksananya replanting kebun kelapa sawit di Sumatera Barat umumnya, dan Kabupaten Dharmasraya khususnya. Tanaman kelapa sawit yang telah memasuki umur lebih dari 25 tahun sudah tidak lagi memenuhi umur ekonomis untuk diteruskan, karena produksi sudah menurun.

Kualitas hubungan koordinasi antara petani dan koperasi petani/KUD dan/atau dengan institusi teknis (Organisasi Penyelenggara Daerah /OPD) terutama Dinas Pertanian dan Dinas Koperasi daerah Kabupaten perlu diperjelas dan ditingkatkan.

Hubungan koordinasi diperlukan dalam kegiatan penyuluhan dan bimbingan teknis budidaya tanaman kelapa sawit, mulai dari pengolahan lahan, penyediaan bibit dan saprodi lainnya, pemeliharaan tanaman, serta pemasaran hasil pane. Selain itu, juga perlu keterlibatan Dinas Koperasi, Perusahaan perkebunan dan eksportir, serta lembaga keuangan lainnya dalam pembiayaan dan pengembangan kelembagaan.

METODA

Bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini berupa pertemuan dan diskusi dengan Pengurus KUD Bukit Jaya dan KUD Suka Maju. Diskusi dilaksanakan interaktif antara Anggota dan Pengurus kedua KUD, Tim Pengabdi dan mitra KUD, serta Tenaga Pendamping dari Tim Teknis Replanting Kabupaten. Materi diskusi adalah teknis pelaksanaan replanting, persiapan kelompok/anggota koperasi dalam pembiayaan kebun apabila dana bantuan telah habis digunakan, dan koordinasi dengan *stakeholders*.

Tempat pelaksanaan kegiatan sesuai dengan alamat KUD, yaitu KUD Bukit Jaya berlokasi di Nagari Koto Baringin di Kecamatan Tiumang, dan untuk kegiatan KUD Suka Maju berlokasi di Nagari Ranah Palabi yang merupakan nagari pemekaran dari Nagari Timpeh, Kecamatan Timpeh. Kedua Kecamatan berada di Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat. Waktu pelaksanaan sesuai kontrak kegiatan pengabdian Pascasarjana Unand yaitu bulan Agustus - November 2019.

Kelompok Sasaran Kegiatan

- 1) KUD Suka Maju; kelompok tani dan koperasi yang masih membutuhkan upaya untuk mengaktifkan kembali koperasi petani yang sudah lama tidak aktif, dan saat ini juga sedang berada pada tahap persiapan *replanting*.
- 2) KUD Bukit Jaya; Kelompok tani dan koperasi kebun kelapa sawit rakyat masih aktif dan juga sedang menyiapkan replanting.

Mitra yang Terlibat

- 1) Badan Perencanaan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Dharmasraya berkontribusi sebagai koordinator dalam keterlibatan Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Kabupaten Dharmasraya dalam peremajaan kebun kelapa sawit.
- 2) Dinas Koperasi Kabupaten Dharmasraya berkontribusi memberikan pedoman teknis sekaligus sebagai pendamping dalam menyelesaikan persoalan prinsipal dan teknis tata kelola administratif keuangan KUD, sehingga kelompok dan KUD dapat menyusun rencana aksi dan melaksanakan peremajaan kebun kelapa sawit.
- 3) Dinas Pertanian Kabupaten Dharmasraya; berkontribusi dalam penyiapan teknis budidaya mulai dari penyiapan lahan, persiapan bibit dan sarana produksi tanaman termasuk pemilihan pola tanam.
- 4) Perusahaan inti PIR-Trans; berpartner dengan OPD teknis terkait, berkontribusi

dalam memfasilitasi petani secara berkelompok agar memiliki kemampuan dan menguasai teknik budidaya peremajaan tanaman, mulai dari penyediaan bibit, pemeliharaan dan panen / pasca panen, termasuk pembiayaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pendampingan dalam Rangka Persiapan Replanting oleh KUD

KUD Suka Maju mulai mengaktifkan kembali koperasi ya dengan kepengurusan baru sejak 2 tahun lalu. Pada tahun 2019, KUD secara berkelompok mengajak anggota mendaftarkan lahan kebun sawit yang dimiliki untuk mendapatkan dana hibah replanting dari dana BPDPKS. Dari 102 anggota KUD Suka Maju, hanya 32 orang yang bersedia ikut dalam pendaftaran pengajuan dana hibah tersebut. Semua anggota peserta replanting tahun ini merupakan penduduk 4 jorong dari 8 jorong di Nagari Ranah Palabi.

Pengajuan dana hibah dilakukan bulan Juli 2019, dan pada Tahun Anggaran 2019 ini KUD berhasil mendapat persetujuan BPDPKS untuk menerima dana hibah replanting. Anggota KUD Suka Maju sebanyak 32 orang anggota terdaftar sebagai peserta replanting tahap 1 dengan dana BPDPKS tahun 2019. Segera pula dibuka pendaftaran peserta replanting untuk tahap 2 yang diharapkan dapat diterima pada pendanaan tahun 2020. Bulan September 2019, sudah dilakukan penandatanganan tiga pihak, yaitu KUD, BPDPKS, dan Dinas Pertanian Kabupaten Dharmasraya. Dari diskusi diketahui bahwa:

- Jumlah anggota penerima dana hibah replanting dari BPDPKS tahap 1 adalah sebanyak 32 Kepala Keluarga Tani Kebun Kelapa Sawit dengan jumlah luas lahan 85,735 Ha dan terdiri dari 44 kapling.
- Jumlah dana Rp. 25 juta/Ha dan pencairan dana replanting dari BPDPKS kepada setiap petani anggota KUD maksimal 2 Ha / anggota
- Tahapan replanting dilakukan berkelompok dan dikelola oleh Pengurus KUD Suka Maju
- Pengurus KUD Suka Maju mengawasi dan menyetujui jumlah pengeluaran setiap tahapan replanting dan memberikan persetujuan kepada Bank (yaitu BNI Cabang Dharmasraya) untuk melakukan pembayaran kepada kontraktor atau petani sebagai tenaga kerja berdasarkan tahapan replanting yang sudah dilakukan

Sementara itu, KUD Bukit Jaya dan kelompok taninya juga sedang menyiapkan tahap pre-replanting. KUD mengajukan bantuan dana hibah replanting kepada BPDPKS untuk tahun anggaran 2020, dan sekarang pada tahap akhir memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi secara online. Kegiatan pengabdian tahun ini adalah kegiatan lanjutan Tim Pengabdian dari tahun sebelumnya yang telah berhasil membuat KUD Bukit Jaya menerima pencairan dana asuransi Idapertabun dan telah menghasilkan rencana aksi replanting KUD Bukit Jaya (Noer, 2018, p. 344).

Bappelitbangda sebagai koordinator perencanaan daerah memiliki tugas dan fungsi serta berkewajiban untuk mengkoordinasikan kegiatan replanting ini dengan dinas / institusi teknis lainnya. Dengan demikian setiap dinas terkait akan menyusun

rencana kegiatan dan anggaran untuk mensukseskan program replanting kebun Kelapa Sawit di Kabupaten Dharmaraya.

Bulan September 2019 yang lalu telah dilaksanakan penandatanganan kesepakatan dana hibah replanting kelapa sawit oleh tiga pihak, yaitu antara KUD Bukit Jaya, BPDPKS dan Dinas Pertanian Kabupaten Dharmasraya. KUD Bukit Jaya bekerja sama dengan BRI dalam hal penyaluran dana hibah replanting yang akan diterima tahun depan. Anggota KUD Bukit Jaya yang telah terdaftar untuk mengikuti replanting dan telah disetujui adalah sebanyak 83 orang dengan luas lahan 227 Ha. Jumlah anggota KUD semuanya tercatat sebanyak 350 orang dengan luas lahan kebun kelapa sawit lebih kurang 700 Ha.

Untuk pelaksanaan dan pemeliharaan kebun mulai periode TBM sampai TM nantinya, apabila setelah penanaman ternyata biaya replanting melebihi jumlah dana Rp. 25 juta, maka untuk kedua KUD akan disediakan oleh Bank yang bekerja sama (KUD Suka Maju dengan BNI, KUD Bukit Jaya dengan BRI), dalam bentuk penyaluran dana Kredit Usaha Rakyat (KUR). KUR dapat disediakan dan diberikan kepada setiap petani anggota KUD yang melakukan *replanting* sesuai kebutuhan, namun petani tidak sedang berada dalam skim pembiayaan dana KUR dari bank mana pun. Semua petani anggota KUD yang mengikuti program replanting dengan dana BPDPS tersebut menyetujui.

Petani yang belum bersedia mendaftar mengikuti program hibah (bantuan) dana replanting kelapa sawit karena belum yakin apabila belum ada contoh yang berhasil menerima dana hibah dimaksud. Beberapa alasan yang berhasil diidentifikasi dari kedua KUD adalah:

- a) Masih belum pulih rasa tidak percaya kepada KUD karena pengalaman masa lalu banyak koperasi yang tidak mampu mempertanggungjawabkan keuangan koperasinya;
- b) Kekhawatiran untuk tidak mampu membayar utang setelah dana hibah habis karena masih terikat dengan perjanjian utang dengan Bank lain;
- c) Tanaman kelapa sawit yang dimiliki masih dapat dipanen dan memberikan penghasilan, dan dirasa masih mencukupi sebagai pendapatan saat ini;
- d) Kekhawatiran tidak memiliki sumber pendapatan lain (pendapatan baru) selama tanaman yang di replanting belum menghasilkan.
- e) Petani belum membangun kembali hubungan kerja sama dalam pemasaran tandan buah segar (TBS) dengan perusahaan pengolah kelapa sawit lokal yang lama. Selama ini petani telah melepaskan diri dari perusahaan mitra awal tersebut, dan menjual TBS kepada pedagang atau perusahaan yang memberikan harga lebih baik menurut petani.

Terkait masalah tersebut, telah diberikan informasi (penyuluhan) kepada petani (kelompok tani) bahwa pengawasan keuangan akan dilakukan oleh BPDPKS melalui Tim Replanting Daerah kepada KUD. Untuk mengatasi masalah keuangan rumah tangga, telah diajak KUD bersama pendamping Replanting dan pendamping KUD untuk menetapkan pilihan komoditi sebagai tanaman sela selama masa Tanaman Belum menghasilkan (TBM). Calon tanaman sela adalah jagung dan kacang-kacangan. Juga diberikan motivasi kepada kelompok tani untuk melakukan replanting dengan metode usaha tani campuran dengan tanaman semusim, walaupun belum memiliki pengalaman

selama ini.

B. Rekomendasi Koordinasi Peremajaan Kelapa Sawit dalam Pembangunan Daerah

Peremajaan perkebunan kelapa sawit membutuhkan peran serta dan keterlibatan aktif semua pihak kepentingan yaitu petani, pemerintah dan pengusaha/perusahaan atau pedagang eksportir kelapa sawit. Berdasarkan temuan pada tujuan pertama di atas, terlihat bahwa peremajaan tidak hanya menjadi urusan Dinas Pertanian-sub dinas Perkebunan Kabupaten Dharmasraya. Badan Perencanaan dan Penelitian Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) Kabupaten adalah badan yang mengkoordinir terwujudnya perencanaan terintegrasi dan terkoordinasi antar dinas/OPD.

Sehubungan dengan itu, kegiatan yang dilakukan Tim Pengabdian dalam rangka meningkatkan koordinasi dalam mensukseskan program peremajaan kelapa sawit adalah:

- 1) Memfasilitasi Pengurus KUD untuk memperoleh bantuan bibit dari sub dinas perkebunan Dinas Pertanian Kabupaten Dharmasraya agar mendapatkan bantuan tanaman sela dan pengetahuan lanjutan tentang pemeliharaan tanaman sela. Hal ini menjadi penting untuk petani sawit di sana karena petani sawit selama ini berusaha tani secara mono kultur yaitu bertani kelapa sawit saja.
- 2) Memberikan motivasi dan pengetahuan kelembagaan kepada pengurus KUD agar mampu melaksanakan kerja sama dengan pihak ketiga (kontraktor) dalam mengolah lahan dan persiapan tanam, menjalin koordinasi dengan pihak dinas terkait, dan menjalin kerja sama dengan pihak perbankan dalam pengelolaan keuangan khususnya dalam pendanaan replanting.
- 3) Menjembatani kelompok tani dan KUD untuk mendapatkan penyuluhan dan pembinaan budidaya dan manajemen usaha yang lebih intensif terutama selama tanaman belum menghasilkan.
- 4) Merekomendasikan program replanting kepada instansi teknis melalui koordinasi dengan Bappeda Kabupaten agar menjadikannya program dan kegiatan yang tercatat di Renstra SKPD dan RPJMD Kabupaten untuk menjamin keberlanjutan program.
- 5) Mengimbau agar Dinas Koperasi Kabupaten yang selama ini belum terlibat dalam perencanaan replanting, agar intensif membina dan membimbing KUD Suka Maju terutama dalam manajemen usaha. KUD Suka Maju sudah lama tidak aktif, dan baru aktif kembali karena replanting. Sebaiknya KUD juga memiliki unit-unit usaha ekonomi lain yang dapat mengembangkan KUD sebagai unit usaha ekonomi.

Kegiatan ini akan membantu: (a) mengembangkan kembali kelembagaan Koperasi (KUD) agar berdaya melalui partisipasi aktif anggotanya, (b) terbangunnya

kelompok tani dan/atau gabungan kelompok tani yang kuat sebagai pelaku utama perkebunan kelapa sawit rakyat. Koperasi dalam hal ini kasus KUD Suka Maju dan KUD Bukit Jaya, diharapkan akan menjadi contoh untuk mensukseskan kegiatan peremajaan (*replanting*) tanaman kelapa sawit rakyat di kabupaten Dharmasraya. Hal ini dapat dilakukan sejalan dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui teknologi budidaya tanaman kelapa sawit seperti yang disampaikan Ikhsan, et al (2019). Diharapkan kegiatan peremajaan kebun kelapa sawit oleh kedua KUD ini merupakan *pilot project* kegiatan pemberdayaan kelembagaan petani dan koperasi untuk mewujudkan pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan di Propinsi Sumatera Barat.

Pada Gambar 2 memperlihatkan kegiatan yang dilakukan di lapangan dalam bentuk pertemuan dan diskusi bersama kelompok tani dan KUD dalam replanting kelapa sawit di Kabupaten Dharmasraya.



Gambar 2. Suasana Diskusi dengan Tenaga Pendamping, Petugas Bank, serta Pengurus dan Anggota KUD Suka Maju dan Bukit Jaya di Kabupaten Dharmasraya

KESIMPULAN DAN SARAN

Pesan utama untuk pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan dan keterkaitannya dengan pembangunan daerah dalam hal ini adalah pentingnya membantu kelompok tani dan koperasi tani kelapa sawit rakyat untuk menyiapkan semua persyaratan dan tahapan kegiatan peremajaan kelapa sawit, serta membantu meningkatkan akses kelompok kepada lembaga atau badan pembiayaan dan pendampingan kultur teknis, termasuk persiapan sosial dan ekonomi, agar kegiatan peremajaan tanaman kelapa sawit dapat terencana dengan baik. Petani dan keluarganya juga perlu menyusun rencana kegiatan ekonomi yang akan menjadi sumber pendapatan rumah tangganya sampai tanaman sawit dapat menghasilkan. Untuk memilih pola tanam seperti apa yang cocok dalam program replanting, bagi petani atau kelompok dan dapat dikelola secara bersama melalui KUD, dirasa masih membutuhkan pengarahan dan pendampingan.

Kapasitas kelompok tani dan koperasi perlu ditingkatkan untuk terbangunnya koordinasi yang efektif antar *stakeholders*, melalui kegiatan pendampingan. Dengan koordinasi yang baik dan efektif, kedua KUD dapat membangun kemitraan kembali dengan perusahaan inti atau perusahaan lain, lembaga perbankan dan lembaga penyedia saprodi (input) untuk menjamin keberlanjutan kebun yang telah di *replanting*. Kedua KUD dapat menjadi contoh kegiatan pemberdayaan petani dan koperasi dalam replanting untuk pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan di Provinsi Sumatera Barat, dengan cara meningkatkan kolaborasi perguruan tinggi, pemerintah, perusahaan, dan masyarakat petani kelapa sawit untuk pembangunan wilayah perdesaan yang lebih baik melalui pembangunan perkebunan berkelanjutan.

UCAPAN TERIMAKASIH

Terima kasih kepada Direktur Program Pascasarjana Universitas Andalas yang telah menyediakan dana hibah pengabdian kepada Penulis sebagai Dosen Program Studi Magister Pembangunan Wilayah dan Perdesaan (PWD) sehingga kegiatan Pengabdian dapat terlaksana pada Tahun Anggaran 2019.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit. 2016. Program Grant Riset Sawit. Jakarta.
- Direktorat Jenderal Perkebunan. 2014. Statistik Perkebunan Indonesia Komoditas Kelapa Sawit 2013-2015. Direktorat Jenderal Perkebunan, Jakarta

- Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian RI. 2017. Keputusan Dirjen Perkebunan No. 29/Kpts/KB.120/3/2017 tentang Pedoman Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit Perkebunan, Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Bantuan Sarana dan Prasarana Dalam Kerangka Pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit Nomor 155/ Kpts/KB.120/4/2018 Tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor 29/Kpts/KB.120/3/ 2017 No.240/ Kpts/KB.120/7/2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan No.29/Kpts/KB.120/3/2017 Nomor 247/Kpts/KB.120/8/2018 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan No.29/Kpts/ KB.120/3/2017.
- Ikhsan, Zahlul et al. 2019. Pemberdayaan masyarakat Nagari Silago Kabupaten Dharmasraya melalui teknologi budidaya tanaman kelapa sawit. *Jurnal Hilirisasi IPTEKS* Vol. 2 No.4.b (2019); Desember 2019. Website. <http://hilirisasi.lppm.unand.ac.id>. e-ISSN: 2621-7198.
- Noer, M., Syarfi, W. Ira, Azhari, dan Rafnel. 2018. Rencana aksi peremajaan perkebunan kelapa sawit rakyat kelompok tani. *Jurnal Hilirisasi IPTEKS* Vol. 1 No. 4b. Desember 2018. Website. <http://hilirisasi.lppm.unand.ac.id>. e-ISSN: 2621-7198. Hal: 339-346.
- Pahan, I. 2008. Kelapa Sawit Manajemen Agribisnis Dari Hulu Hingga Hilir. Penebar Swadaya, Jakarta.
- Wahyono, Teguh dan Amalia Rizki. 2014. Kontribusi Kelapa Sawit Sebagai Pilar Perekonomian Bangsa. *Sawit Indonesia Online*. [Sawit Indonesia.com](http://SawitIndonesia.com) [2 Desember 2016].